



EVALUASI DAN PROSPEK LANJUTAN PROGRAM FORCLIME 4.0

ARTIKEL LAINNYA

FASILITATOR KAMPUNG ADAKAN SURVEI AWAL KELOMPOK TANI HUTAN di Kampung Yanggandur, Papua Selatan

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI dengan Metoda METT di Papua Barat Daya

BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR Susun SOP Penyelenggaraan eLearning

MENDUKUNG GREEN YOUTH MOVEMENT di Sulawesi Tengah

Editorial

Dalam Newsletter FORCLIME bulan ini, ada sesuatu yang perlu dirayakan. Kami telah berhasil menyelesaikan misi penilaian (*appraisal mission*) untuk **FORCLIME Reloaded**, membuka jalan untuk melanjutkan perjalanan kami dalam mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para pihak di daerah dalam pengelolaan hutan lestari dan peran sektor kehutanan Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Misi penilaian ini merupakan pendekatan partisipatif yang dilakukan GIZ, bersama dengan mitra kami di tingkat lokal dan nasional, untuk merencanakan seperti apa proyek tindak lanjut FORCLIME nantinya. Melalui diskusi dengan mitra lokal di provinsi-provinsi Indonesia bagian timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Selatan, kami dapat mengikuti pendekatan *bottom-up* yang didukung oleh KLHK pada lokakarya terakhir pada tanggal 9 September 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kami beruntung dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan pembelajaran dalam mendukung proses tata kelola hutan lokal dan berharap dapat membantu mempercepat pembentukan administrasi kehutanan baru dan skema perhutanan sosial di provinsi-provinsi baru. Pada saat yang sama, proses dan institusi kebijakan kehutanan yang ada, seperti Cagar Biosfer Lore Lindu di Sulawesi Tengah atau Galeri KPH di Jayapura, akan semakin diperkuat. Dengan bekerja sama dengan jaringan berbagai provinsi di Indonesia bagian timur, kami berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran bersama dan memajukan pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia yang indah ini.



Dengan adanya kesamaan pemahaman antara KLHK dan Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) bahwa Indonesia bagian timur kini berada di garis depan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dan bahwa dengan mendukung pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di sana akan mencapai hasil maksimal dari visi strategi FOLU Net Sink 2030, kami memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Pada saat yang sama FORCLIME sangat menyadari bahwa menciptakan mekanisme insentif untuk perlindungan hutan, baik bagi masyarakat lokal maupun pemangku kepentingan lainnya, akan menjadi kebutuhan inti dalam kebijakan kehutanan di masa depan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mewujudkan visi ini dalam proyek **FORCLIME Reloaded**. Selain itu, kami menyadari bahwa semua hal ini tidak dapat dicapai tanpa staf kehutanan yang terlatih dan berdedikasi, dan kami senang dapat terus mendukung Pusat Pelatihan Kehutanan Nasional serta pusat pelatihan kejuruan setempat dalam peningkatan kapasitas. Tentu saja mengikuti cara baru dalam melakukan sesuatu dan mendukung transformasi digital pendidikan kehutanan melalui pendekatan *eLearning* dan *blended learning*.

Izinkan saya menutup dengan ucapan terima kasih kepada Biro Perencanaan KLHK dan seluruh mitra yang terlibat atas dukungan dan bimbingannya. Kami sangat senang bahwa tim FORCLIME dapat terus mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mitra lokal kami pada tahun 2025-2028, dan kami berharap dapat melanjutkan kerja sama kami sebagai mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah di Indonesia bagian timur yang dapat diandalkan dan dipercaya.

Georg Buchholz
Direktur Program FORCLIME

Evaluasi dan Prospek Lanjutan Program FORCLIME 4.0: Misi Penilaian dan Rekomendasi untuk FORCLIME-Reloaded

Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME
Tazkiyah Syakira, Adviser Junior untuk Monev dan Pelaporan

FORCLIME 4.0 *Technical Cooperation* (TC) yang saat ini sedang berjalan sejak tahun 2021, dijadwalkan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut tahun terakhir pelaksanaan program, telah dilaksanakan sebuah misi penilaian (*appraisal mission*) pada 21 Agustus hingga 8 September tahun ini. Misi penilaian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam serta mengumpulkan masukan dari berbagai pihak yang terkait dalam implementasi program yang sedang berjalan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program yang akan datang.

Berlanjutnya program FORCLIME didasarkan pada negosiasi antar-pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021. Dalam negosiasi tersebut, disepakati kelanjutan modul *Forests and Climate Change Programme* (FORCLIME) untuk periode tahun 2025 hingga 2028. Modul ini kemudian dinamai sebagai “FORCLIME-Reloaded” yang menjadi bagian dari kluster pengelolaan *Resilient Nature* di GIZ Indonesia.

Misi penilaian ini melibatkan satu staf Teknis Kantor Pusat GIZ di Jerman, satu perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan satu orang konsultan internasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan di empat provinsi sebagai lokasi kerja FORCLIME, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Tengah. Selama pelaksanaannya, dilakukan serangkaian

pertemuan dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait.

Pada agenda kunjungan lapangan, tim misi penilaian berdialog dengan pemerintah di level sub-nasional, diantaranya ialah Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Papua), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta beberapa unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seperti Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Lore Lindu dan Balai Taman Nasional Wasur.

Di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tim melakukan diskusi dengan KPH Sorong Selatan dan KPH Tambrauw di Provinsi Papua Barat Daya serta KPH Kulawi dan KPH Banawa Lalundu di Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan ke Galeri KPH di Jayapura, Provinsi Papua, juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai arah pengembangan usaha dan pasar hasil hutan bukan kayu di masa depan.

2



Diskusi teknis juga dilakukan dengan pihak akademisi serta pihak terkait lainnya untuk membahas isu-isu yang lebih mendalam, mulai dari perhutanan sosial hingga masyarakat adat. Bersama akademisi, pembahasan dilakukan bersama Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow-Geissler Papua (UOGP), Universitas Sorong, Universitas Papua (UNIPA), Universitas Victory, Universitas Tadulako (serta Herbarium Celebense), dan SMK Kehutanan. Sementara dengan pihak terkait lainnya, pertemuan dilakukan dengan Fauna & Flora International (FFI), Karsa Institute, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), serta Yayasan Merah Putih.

Misi penilaian bertujuan untuk kelanjutan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), dinamai “FORCLIME-Reloaded” untuk periode 2025 - 2028



Pertemuan dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua



Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua

Pertemuan dengan masyarakat dan desa dampingan FORCLIME juga menjadi poros pelaksanaan misi penilaian ini. Beberapa desa yang menjadi mitra dampingan kami diantaranya ialah Kampung Adat Babrongko, desa sekitar TN Lore Lindu (Desa Toro, Desa Baku-Bakulu, dan Desa Beka), kampung di sekitar TN Wasur (Kampung Yanggandur dan Kampung Wasur), Kelompok Tani Perempuan di Kampung Yanggandur, serta Kelompok Anggrek Perempuan di Desa Bahagia dan Desa Karunia. Bersama masyarakat di desa-desa tersebut, dibahas mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti pengolahan rotan, gula merah, madu, dan budidaya anggrek. Selain itu, saran dan masukan dari masyarakat terkait hutan desa, hutan adat, kelompok usaha perhutanan sosial, serta pariwisata juga dibahas dan menjadi temuan penting dari misi penilaian ini.

Diskusi teknis juga dilakukan dengan pihak akademisi serta pihak terkait lainnya untuk membahas isu-isu yang lebih mendalam, mulai dari perhutanan sosial hingga masyarakat adat.

4



Atas: Fasilitator Kampung menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kampung Barongko, Kabupaten Jayapura, Papua
Bawah: Diskusi bersama Balai Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Papua Selatan



Selain dari pertemuan dan diskusi, kunjungan lapangan juga dilakukan di beberapa area konservasi dan pendidikan, diantaranya ialah Hutan Pendidikan Pasir 6 UOGP, Taman Nasional Wasur, dan Taman Wisata Alam Sorong.

Pada akhir misi penilaian di lapangan, temuan dan rekomendasi tim penilaian disampaikan dan didiskusikan dalam sebuah lokakarya yang diadakan pada tanggal 1 September di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Lokakarya ini mengundang perwakilan dari Biro Perencanaan KLHK, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua, BBKSDA, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Balai PSKL Maluku Papua, serta Biro Hukum Provinsi Papua Selatan sebagai perwakilan Dinas Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan.

Saran dan masukan dari masyarakat terkait hutan desa, hutan adat, kelompok usaha perhutanan sosial, serta pariwisata juga dibahas dan menjadi temuan penting dari misi penilaian ini.



Atas: Pertemuan dengan Pemprov Papua Selatan. Bawah: Kunjungan ke KTH Sederhana di Kampung Yanggandur, Kabupaten Merauke, Papua Selatan



Usulan hasil misi penilaian untuk 'FORCLIME-Reloaded' yang disepakati pada lokakarya tersebut, yaitu peningkatan implementasi pengelolaan hutan lestari pada tiga tatanan pengelolaan hutan di hutan wilayah kerja. Dengan detail *output* (keluaran) sebagai berikut:

- **Keluaran 1:** Kelanjutan saran kebijakan kehutanan (tingkat nasional dan lokal).
- **Keluaran 2:** Dukungan pengelolaan hutan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kerja.
- **Keluaran 3:** Dukungan pengembangan kapasitas manusia (dalam empat tingkat pengembangan kapasitas sesuai kapasitas kerja).

Rekomendasi yang telah disepakati pada lokakarya tingkat sub-nasional tersebut kemudian dibahas di tingkat nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada tanggal 7 September 2023. Acara lokakarya ini dibuka dan dipimpin oleh Edward Sembiring S.Hut MSI selaku Kepala P3E Papua yang mewakili Plt. Kepala Biro Perencanaan KLHK, Apik Karyana MSc. Sambutan dan pengantar juga diberikan oleh Dr. Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, dan Georg Buchholz sebagai Direktur Program FORCLIME 4.0.

Dalam lokakarya tersebut diadakan sesi diskusi untuk mendapatkan masukan dan arahan yang konstruktif guna penyempurnaan modul 'FORCLIME-Reloaded'. Sebagai penutup acara, risalah pembahasan hasil *appraisal mission* 'FORCLIME-Reloaded' kemudian ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan KLHK.

Sebagai tindak lanjut dari misi penilaian ini, tim pelaksana akan melakukan peninjauan ulang terhadap usulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil diskusi pada saat lokakarya di Sorong dan di Gedung Manggala Wanabakti, yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan proposal program 'FORCLIME-Reloaded' mendatang.

Rekomendasi yang telah disepakati pada lokakarya tingkat sub-nasional tersebut kemudian dibahas di tingkat nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada tanggal 7 September 2023.



Kunjungan lapangan ke Kampung Yanggandur di Kabupaten Merauke, Papua Selatan



Pertemuan dengan KPH Kulawi, Sulawesi Tengah



Pertemuan dengan KPH Sorong, Papua Barat Daya



Diskusi dengan warga di Kampung Wendi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya



Kunjungan lapangan ke KUPS Singgani Pura (Rotan dan Bambu), Desa Salua Wilayah Pendampingan KPH Kulawi, Sulawesi Tengah

Fasilitator Kampung Adakan Survei Awal Kelompok Tani Hutan di Kampung Yanggandur, Papua Selatan

Setelah mengikuti pelatihan Pembekalan bagi Fasilitator Kampung di Tanah Papua, Theodorus Tethool S.Sos., fasilitator di Kampung Yanggandur, melakukan survei awal kelompok tani hutan (KTH) yang ada di Kampung Yanggandur, salah satu kampung dukungan FORCLIME dan Balai Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan survei, dilakukan pada tanggal 1 – 2 Agustus 2023, bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok yang ada di kampung tersebut, termasuk melihat dokumentasi administrasi KTH, jenis produk usaha serta pemasarannya. Dalam dua hari kegiatan tersebut, Theodorus melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kepala Kampung Yanggandur, KTH Empi Wae Tetepuh (artinya kelompok satu hati untuk tujuan baik), dan KTH Sederhana.

KTH Empi Wae Tetepuh memiliki 11 anggota, dengan produk usaha: madu, abon ikan gabus toraja (gastor), minyak buah merah, minyak kemiri, teh sarang semut, sabun propolis dari lebah madu hitam. Sedangkan KTH Sederhana beranggotakan 15 orang, dengan produk usaha hampir sama dengan KTH Empi Wae Tetepuh ditambah dengan produk keripik (singkong, ubi), minyak kayu putih, *virgin coconut oil* (VCO).



Dari hasil survei awal diperoleh data mengenai status kelembagaan KTH, produk usaha dan produksi serta pemasarannya. Walaupun KTH Sederhana sudah dapat memasarkan produknya ke Merauke dan provinsi bahkan ke tingkat nasional melalui akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook), namun masalah pemasaran masih merupakan tantangan bagi KTH di Kampung Yanggandur. Tantangan lainnya adalah terkait perlunya penguatan kelembagaan organisasi dan pengurusan perizinan produk dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selama enam bulan kedepan, Theodorus akan mendampingi kedua KTH tersebut. Dalam pendampingan ini, fasilitator kampung bersama dengan KTH dampungannya akan membuat rencana kerja, termasuk kegiatan peningkatan kapasitas untuk keberlanjutan usaha kelompok tani di kampung tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Theodorus Tethool**, Fasilitator Kampung Yanggandur
2. **Ruben Yogi**, Advisor bidang GIS dan Pemetaan
Rut Ohoiwutun, Advisor, Hutan masyarakat dan hutan adat

Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Metoda METT di Papua Barat Daya

Dalam rangka merealisasikan rencana program yang kegiatan bersama untuk tahun 2023, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat dan FORCLIME melaksanakan kegiatan penilaian diri (*self-assessment*) atas kawasan konservasi yang berada dalam lingkup BBKSDA Wilayah I Sorong pada tanggal 22 sampai 24 Agustus 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ada lima kawasan konservasi yang melakukan *self-assessment*, yaitu: Cagar Alam (CA) Pulau Misool, CA Pulau Salawati, CA Pantai Sausapor, CA Pegunungan Tamrau Utara dan Taman Wisata Alam (TWA) Beriat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka mengevaluasi pengelolaan yang telah dilaksanakan. Metoda yang digunakan untuk *self-assessment* ini adalah *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Acara dibuka oleh bapak Fajar F.D. Darwis S.Hut., Pengendali Ekosistem Hutan BBKSDA Papua Barat, dan dihadiri 35 peserta termasuk perwakilan dari BBKSDA Papua Barat, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kampung dari lima kawasan yang dinilai, serta mitra pembangunan (FORCLIME dan FFI). Dalam acara tersebut, Bapak Mohamad Rizki Riadhi, S.Hut., Pengendali Ekosistem Hutan BBKSDA Papua Barat menyampaikan profil lima kawasan konservasi yang dinilai. Sedangkan kegiatan *self-assessment* pengelolaan kawasan konservasi difasilitasi oleh Dr Ismet Khaeruddin, advisor senior FORCLIME bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



menggunakan metoda METT, yang merupakan metoda pendekatan yang diterima secara internasional, untuk memantau dan menilai keseluruhan pengelolaan kawasan konservasi. Evaluasi ini dilakukan setiap dua tahun sekali. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu target kinerja pengelolaan kawasan konservasi pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE Tahun 2020 – 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Ditjen KSDAE telah menetapkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memonitor capaian efektivitas pengelolaan suatu kawasan konservasi.

Hasil *self-assessment* tersebut disusun sebagai laporan dari masing-masing kawasan konservasi untuk disahkan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang kemudian dapat dijadikan panduan perencanaan BBKSDA Papua Barat untuk dua tahun ke depan. Selain itu, hasil tersebut juga menjadi acuan untuk program kolaborasi bersama mitra BBKSDA Papua Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Nita Yohana**, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Susun SOP Penyelenggaraan eLearning

Sejak tahun 2014 FORCLIME mendukung Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP LHK) dalam pengembangan eLearning. Kemajuan pengembangan eLearning di berbagai BP LHK cukup bervariasi karena kondisi lembaga dan kelompok target pelatihan di masing-masing daerah juga beragam.

Untuk menelaraskan pengembangan eLearning di berbagai BP LHK, FORCLIME bekerja sama dengan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Makassar (BP LHK Makassar), Sulawesi Selatan, menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyelenggaraan eLearning pada tanggal 10 Agustus 2023 di Kantor BP LHK Makassar. Lokakarya ini dihadiri sekitar 25 peserta dari unsur Pejabat, Widyaiswara dan staf Balai Pelatihan LHK Makassar serta guru dari SMK Kehutanan Negeri Makassar.

Hal yang dibahas dalam lokakarya ini mencakup: (1) Langkah-langkah dalam penyelenggaraan eLearning, (2) Pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan eLearning, (3) Penjaminan



mutu dalam penyelenggaraan eLearning. Informasi yang digali selama lokakarya tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan SOP penyelenggaraan eLearning di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar serta Balai Pelatihan LHK lainnya.

Hasil lokakarya tersebut juga akan dikompilasi dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) sebagai masukan dalam pengembangan eLearning di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Mendukung *Green Youth Movement* di Sulawesi Tengah

Setelah diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus lalu, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, didukung FORCLIME, menyelenggarakan pelatihan *Green Youth Movement* pada tanggal 25 – 26 Agustus 2023 di Palu, Sulawesi Tengah. *Green Youth Movement* atau Gerakan Pemuda Hijau merupakan program pendidikan dasar gerakan lingkungan hidup dan wadah bagi generasi muda untuk bertukar pengetahuan dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

Pelatihan *Green Youth Movement* di Sulawesi Tengah diikuti oleh 20 siswa dan siswi dari sembilan sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) yang ada di Kota Palu, yang kemudian akan dipilih siswa/siswi dengan prestasi terbaik. Melalui pelatihan ini, peserta mendapat pengetahuan mengenai Taman Nasional Lore Lindu dan penetapan Cagar Biosfer Lore Lindu, dimana Taman Nasional Lore Lindu merupakan zona inti dari Cagar Biosfer Lore Lindu.

“Penyadartahuan mengenai Cagar Biosfer Lore Lindu perlu dilakukan kepada setiap kelompok masyarakat, termasuk melalui kegiatan ini, sehingga Cagar Biosfer Lore Lindu dapat diketahui oleh semua kalangan”, kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Dr. Titik Wurdiningsih, dalam pembukaan acara tersebut.



Green Youth Movement ini dilaksanakan melalui 100 unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 15 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani, yang ditetapkan sebagai ‘simpul belajar’. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu merupakan salah satu simpul belajar dalam pelaksanaan kegiatan *Green Youth Movement* 2023 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada bulan Oktober nanti, kegiatan *Green Youth Movement* ini akan menghasilkan 10 siswa dan 10 siswi dari seluruh Indonesia yang akan dinobatkan sebagai *Green Ambassador* dan akan bertemu langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
2. Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Diimplementasikan oleh:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Bekerja sama dengan:

